



**Judul** : DPR dukung mafia migas diberantas  
**Tanggal** : Sabtu, 18 Januari 2020  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 10

# DPR Dukung Mafia Migas Diberantas

ANGGOTA Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Charles Meikyansyah, menegaskan bahwa DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas mafia migas. Pemanfaatan kekayaan negara harus didasarkan pada pemasukan bagi negara.

"Tentu kami sangat mendukung program pemerintah untuk memberantas mafia migas," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/1).

Menurut Charles, keberadaan mafia migas dapat merugikan pemasukan uang negara. Selain itu, mafia migas juga akan merugikan masyarakat. Padahal, berdasarkan amendemen UUD 1945 Pasal 33 bahwa kekayaan alam, tidak terkecuali migas, dikuasai sepenuhnya oleh negara dan demi kepentingan orang banyak.

"Kalau mafia masih ada, tentu yang diuntungkan hanya segelintir golongan," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bertemu Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1).

Salah satu yang dibahas oleh keduanya ialah soal penyelesaian masalah minyak dan gas (migas). Pasalnya, mafia migas kerap membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi geram. Bahkan, Jokowi pernah mengatakan ingin menggigit mafia migas.

"Beliau sudah sering munculkan kata yang begitu keras (soal mafia migas). Saya pikir jangan sampai ke Presiden, kalau perlu 'menggigit' ya, saya duluan yang menggigit, jangan Presiden duluan," tegas Moeldoko.

Menurut dia, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan Pertamina agar keinginan Jokowi memberantas mafia migas bisa terealisasi.

Pengamat energi Fahmy Radhi mengungkapkan mafia migas beroperasi dengan memanfaatkan dua kelemahan. Pertama, kelemahan pengambilan keputusan yang bisa disuap sehingga bisa dikendalikan. Kedua, dengan memanfaatkan tata kelola yang tidak transparan atau dibuat tidak transparan. (Uta/E-1)